



Bahan LKPJ



**Dinas
Perdagangan
Kab. Bantul**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trenggong, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.

Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

b. Ringkasan Urusan Pilihan (PERDAGANGAN)

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

2. Program, Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran

a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp254.969.000

Realisasi Anggaran : Rp250.877.172 (98.395%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang 291 ob
- Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Jenis
- Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering) 12 Jenis

- Jumlah Perangko Materai Dan Benda Pos 1.051 Lembar
- Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12 Paket
- Pembayaran Telepon 12 Bulan
- Jumlah Surat Kabar/Majalah 720 Eksemplar
- Jumlah Barang Cetak 12 Jenis
- Jumlah Pengadaan 60.000 Lembar
- Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 24.000 oh
- Jumlah Pengadaan Pompa 1 Unit

2. Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Alokasi Anggaran : Rp650.054.680

Realisasi Anggaran : Rp617.156.193 (94.939%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Makan Minum Rapat 1.740 ok
- Jumlah Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan 2210 ok
- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 850 op
- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 91 op

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 3.167.568.700

Realisasi Anggaran : Rp3.128.165.529 (98.756%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak 46.020 ob
- Pembayaran Sewa Tanah/Lahan Untuk Pasar 8 Pasar

b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan / Rehabilitas Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp403.385.000

Realisasi Anggaran : Rp389.609.000 (96.585%)

Tingkat Capaian :

- Pengadaan Dump Truck 1 Unit
- Jumlah Pengadaan 2 Unit

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp487.025.000

Realisasi Anggaran : Rp478.627.875 (98.276%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Pengisian Freon AC 17 Unit
- Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 Paket

3) Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp80.000.000

Realisasi Anggaran : Rp75.618.000 (94.523%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Bahan Baku Untuk Pemeliharaan Gedung 2 Paket

4) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 306.105.000

Realisasi Anggaran : Rp266.017.801 (86.904%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran Jasa Service Kendaraan Dinas 35 Unit
- Jumlah Penggantian Suku Cadang 35 Unit
- Jumlah Bahan Bakar Minyak /Gas Dan Pelumas 21.230 Liter
- Jumlah Jasa Kir 3 Unit
- Jumlah Tanda Nomor Kendaraan 35 Unit
- Jumlah Pengisian Freon AC Mobil Dinas 2 Unit

Permasalahan :

Pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan penyediaan 1 unit truk pengangkut sampah. Sudah dianggarkan BBM untuk operasional truk tersebut. Truk tersebut terealisasi pada akhir tahun, sehingga BBM untuk operasional truk tidak bisa direalisasikan.

Solusi :

Pada tahun 2018 truk tersebut harus dioperasionalkan untuk mengangkut sampah di pasar-pasar.

5) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan

Alokasi Anggaran : Rp. 45.500.000

Realisasi Anggaran : Rp42.159.600 (86.904%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Pengisian Freon AC 17 Unit
- Jumlah Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

Permasalahan :

Tidak banyaknya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Solusi : Menganggarkan sesuai kebutuhan

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Alokasi Anggaran : Rp 93.485.000

Realisasi Anggaran : Rp91.837.500 (98.238%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah PNS Untuk Peningkatan Kualitas Aparatur 95 Orang

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kependidikan Dan Ketatausahaan

Alokasi Anggaran : Rp37.875.000

Realisasi Anggaran : Rp36.311.100 (95.871%)

Tingkat Capaian :

- Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan 9 Dokumen
- Jumlah Peserta FGD Akuntabilitas Kinerja

e) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

1) Kegiatan Pelayanan Kemetrolgian Daerah

Alokasi Anggaran : Rp.2.029.845.000

Realisasi Anggaran : Rp1.578.454.040 (77.762%)

Tingkat Capaian :

- Terlaksananya Operasional UPT Metrologi 12 Paket
- Jumlah Peserta FGD Kemetrolgian 880 Orang
- Jumlah Pengadaan Electric Generating Set 1 Unit
- Jumlah Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Roda 4 Pelayanan Metrologi) 1 Unit
- Jumlah Pengadaan Alat Kalibrasi 1 Unit
- DED Pembangunan Gedung Metrologi 1 Dokumen
- Sistem Informasi Pendataan Wajib Tera 1 Aplikasi
- Jumlah Alat Kesehatan Kerja 13 Unit
- Jumlah Alat Pemadam Kebakaran 2 Unit
- Jumlah Wireles 1 Unit
- Jumlah Printer 1 Unit
- Jumlah CCTV 2 Unit

- Jumlah LCD 1 Unit
- Jumlah Alat Dapur 1 Unit
- Jumlah Mebelair 1 Paket
- Jumlah Kipas Angin 2 Unit
- Jumlah AC 2 Unit

Permasalahan :

Permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrolgian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak.

Solusi :

Memilih penyedia yang benar-benar bisa menyediakan peralatan metrologi sesuai dengan yang dibutuhkan

2) Kegiatan Pelayan Pengamanan Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 124.675.000

Realisasi Anggaran : 120,231,600 (96.436%)

Tingkat Capaian :

- Kajian Pupuk Bersubsidi 1 Dokumen
- Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis 1 Dokumen
- OPM Barang Kebutuhan Pokok Strategis 3 Kali

f) Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaa Dan Pemanfaatan Tanah

1) Kegiatan Pengadaan Tanah Dari Tanah Kas Desa

Alokasi Anggaran : Rp3.994.450.000

Realisasi Anggaran : Rp101,636,000 (2.544%)

Tingkat Capaian :

- Pembayaran TKD Yang Digunakan Pasar Niten Dan Sorobayan 2 Lokasi

Permasalahan :

Pengadaan tanah kas desa terdiri dari 2 lokasi yakni pasar Niten dan pasar Sorobayan. Sampai dengan Oktober 2017 hanya pasar Niten yang bisa mengumpulkan berkas untuk pembebasan lahan tanah kas desa untuk pasar Niten. Kemudian Surat Ijin Gubernur DIY tentang pelepasan tanah kas desa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 belum terbit, sehingga proses penggantian TKD tersebut tidak bisa direalisasikan.

Solusi :

Mengurus administrasi proses penggantian TKD lebih cepat dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Bantul serta Pemda DIY

g) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

1) Pengembangan Pasar Dan Ekspor Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 1.461.363.000

Realisasi Anggaran : Rp1.406.401.550 (96.239%)

Tingkat Capaian :

- Jumlah Peserta Pelatihan MPLN 30 Orang
- Jumlah Peserta Pelatihan Kemasan 60 Orang
- Jumlah Peserta Pelatihan Pemasaran Dan Distribusi 30 Orang
- Jumlah Peserta Pemasaran Online 30 Orang
- Jumlah Pameran Di Dalam Dan Di Luar DIY 10 Pameran
- Jumlah Hadiah Lomba Stand Bantul Expo 3 Paket

h) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah

1) Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 25.299.000

Realisasi Anggaran : Rp22.730.000 (89.845%)

Tingkat Capaian :

- Laporan Pelaksanaan Retribusi Pasar 12 Laporan

i) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1) Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem Resi Gudang

Alokasi Anggaran : Rp. 207.444.000

Realisasi Anggaran : Rp205.091.100 (98.866%)

Tingkat Capaian :

- Honorarium Manager Pengelola Gudang SRG 96 ob
- Operasional Gudang SRG 12 Paket
- Jumlah Peserta Sosialisasi SRG 100 orang
- Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG 1 Dokumen

2) Kegiatan Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Bergulir

Alokasi Anggaran : Rp. 7.750.000

Realisasi Anggaran : Rp7.415.000 (95.677%)

Tingkat Capaian :

- Laporan Pelaksanaan Dana Bergulir 12 Laporan

3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional

Alokasi Anggaran : Rp. 930.861.000
Realisasi Anggaran : Rp879.561.964 (94.489%)
Tingkat Capaian :
- Jumlah Pembanguna Pasar Janten 1 Paket

4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Alokasi Anggaran : Rp. 855.945.000
Realisasi Anggaran : Rp767.260.200 (89.639%)
Tingkat Capaian :
- Honorarium pegawai PSG 443 ob
- Jasa Appraisal PSG 1 dokumen
- Pertunjukan di PSG 3 kali
- Lomba di PSG 2 kali

j) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

1) Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Alokasi Anggaran : Rp. 192.410.000
Realisasi Anggaran : Rp55.849.000 (29.026%)
Tingkat Capaian :
- Kajian Penataan PKL di Imogiri 1 Dokumen
- Jumlah Tenda Yang Diberikan Pda Masyarakat/PKL 40 Unit

k) Program Pemberdayaan Pedagang

1) Kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan Dan Promosi Pasar

Alokasi Anggaran : Rp. 890.597.500
Realisasi Anggaran : Rp875.195.000 (98.271%)
Tingkat Capaian :
- Jumlah Pelatihan Pedagang Pasar 720
- Hadiah Pemenang Lomba Pasar 1 Paket
- Peresmian Pasar 1 keg
- Promosi Pasar 1 keg
- Grebeg Pasar 1 keg
- Baliho Promosi Pasar 7 Unit

l) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

- 1) Kegiatan Promosi Lewat Media Massa
Alokasi Anggaran : Rp. 71.400.000
Realisasi Anggaran : Rp71.300.000 (99.860%)

Tingkat Capaian :
- Jumlah Promosi Melalui Media Massa 12 kali

m) Program Pembangunan Rehabilitas Pemeliharaan Infrastruktur Pedesaan

- 1) Kegiatan Peembangunan Infrastruktur Pedesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 6.125.000
Realisasi Anggaran : Rp6.119.000 (99.902%)

Tingkat Capaian :
- Operasional Pelaksanaan Pembangunan Pasar 1 Paket

- 2) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 102.300.000
Realisasi Anggaran : Rp98.041.000 (95.837%)

Tingkat Capaian :
- Jumlah DED Pasar 1 Dokumen
- Jumlah Dokumen Lingkungan 1 Dokumen

- 3) Kegiatan Rehabilitas/Pemeliharaan Infrastruktur
Alokasi Anggaran : Rp. 8.387.850.000
Realisasi Anggaran : Rp8.053.695.292 (96.016%)

Tingkat Capaian :
- Pembangunan Pasar 3 Unit
- Pembangunan Taman 1 Paket
- Jumlah Bahan/Bibit Tanaman 1 Paket
- Sewa Shelter Untuk Relokasi Pasar Semampir 1 Paket
- Rehab Pasar (kecil) 7 Pasar

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dinas Perdagangan **tidak** menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan Fungsional

SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan

SD	JENIS PENDIDIKAN						JML	GOLONGAN				JML
	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
4	7	82	1	17	10	0	121	10	46	56	9	121

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

Pejabat Dinas Perdagangan Tahun 2017

NO	NAMA ASN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	IR. SUBIYANTA HADI, M.M	Kepala Dinas	Strata 2
2	RENI MARIASTUTI, SH. MHUM	Sekretaris Dinas	Strata 2
3	YUS WARSENSO, S.Pi, M.Sc	Kepala Bidang Sarana Prasarana & Distribusi Perdagangan	Strata 2
4	IR. AGUS RIYADMADI	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan	Strata 2
5	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.SOS	Kepala Bidang Pengembangan Pasar	Strata 1
6	DRA. KUN ERNAWATI, M.SI	Ka. Subbag. Program, Keuangan dan Aset	Strata 2
7	IR. SURYONO. M.SI	Kepala Seksi Pengembangan Ekspor	Strata 2
8	BESARI SETYOWATI, SE,MAP	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Strata 2
9	HARDIONO, SE	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Strata 1
10	HENI PURNOMO	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	SMA
11	HARTINI, SIP	Kepala Seksi Pendapatan	Strata 1
12	HENRY HARTANTI, SP	Ka UPT	Strata 1
13	ZUHRIYATUN NUR HANDAYANI, SP	Kepala Seksi Distribusi & Harga Barang Pokok	Strata 1
14	HARYANA, SE	Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan	Strata 1
15	SRI RUSMINIWATI, S.IP MAP	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan	Strata 2
16	IWAN RASIA HERTANTO, ST. M.Si	Ka. Subbag Tata Usaha UPT Metrologi	Strata 2

Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2017-2021, dengan sinkronisasi antara bottom up planing

dengan Top down planing, dimana prosesnya dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat pada forum Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, kemudian dilakukan skala prioritas dan penyesuaian arah kebijakan perencana tingkat kabupaten.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54/2010 pasal 86 ayat (2) mengamanatkan bahwa proses perencanaan yang tertuang dalam Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dengan demikian, maka visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perencanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul.

Berikut cascading atau benang merah antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul:

**Benang Merah Antara Rpjmd Kabupaten Bantul 2016-2021
Dan Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021**

MISI DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	SASARAN OPD	INDIKATOR OPD
Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas.	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
			Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor

Sumber: RPJMD Kab. Bantul dan Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Perdagangan saat ini cukup memadai, sesuai dengan kapasitas beban kerja yang ada pada saat ini, meskipun masih terus dilakukan penambahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan yang semakin meningkat. Total sarana prasarana/aset yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

NO.	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	32.870.851.583
2	Peralatan dan Mesin	5.614.747.180
3	Gedung dan Bangunan	131.511.152.437
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	124.274.909
5	Aset tetap lainnya	9.284.833
6	Aset lainnya	135.580.750
	Jumlah	170.265.891.679

Sumber: Subbag PKA Dinas Perdagangan, 2017

7. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan perdagangan.

Tabel 3
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perdagangan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar
2	pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3	Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak	Memutus jalur distribusi barang agar lebih cepat dan efisien

No.	Permasalahan	Solusi
	terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.	
4	Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UMKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri
5	Daya saing produk yang semakin tinggi dengan berlakunya MEA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan promosi yang lebih intensif. - Peningkatan daya saing.
6	Mindset / pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Manajemen Pasar - Meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan dengan menambah armada truck sampah.
7	Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Memperluas jangkauan/distribusi pengelolaan dana bergulir serta menambah modal, agar semakin maksimal pedagang yang terlayani.

Sumber: Dinas Perdagangan, 2017

7. Perdagangan

Kebijakan pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul diarahkan pada terwujudnya tata kelola perdagangan yang adil dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 antara lain adalah meningkatnya kualitas pasar rakyat, meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dan meningkatnya pertumbuhan ekspor

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Pasar Kondisi Baik Tahun 2017 Di Kabupaten Bantul

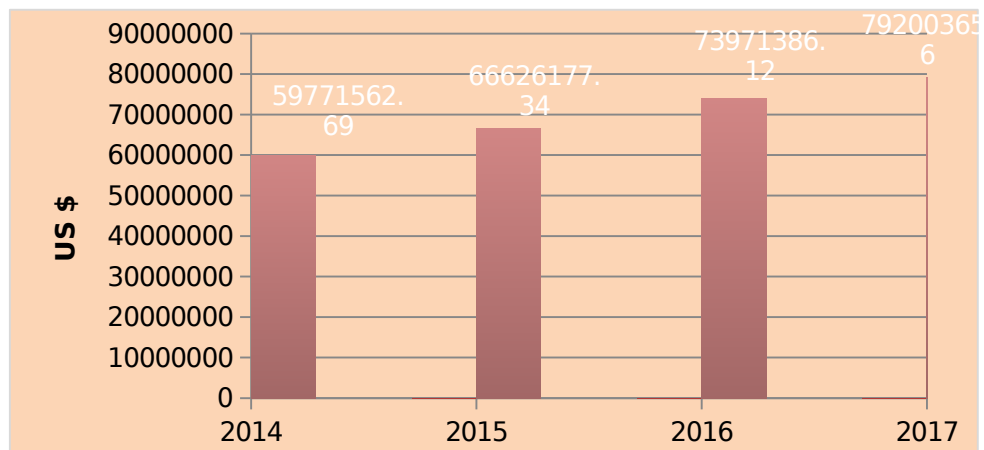
NO.	NAMA PASAR	LUAS TANAH	KEPEMILIKAN	JUMLAH PEDAGANG
1	Bantul	27714	pemda	1,565
2	Niten	32,635	Kas Desa	926
3	Klitikan Niten	4,000	Kas Desa	167
4	Janten	1,000	pemda	79
5	Piyungan	23,500	Pemda	1,015
6	Imogiri	48,000	Kas Desa	1,587
7	Angkruksari	20,035	Kas Desa	513
8	Pijenan/Gesikan	15,000	Pemda	258
9	Hw.Pandak	1,888	SG	73
10	Pundong	6,085	Kas Desa	500
11	Jejeran	4,000	SG	711
12	Pleret	6,150	SG	421
13	Hw.Imogiri	12,000	Kas Desa	120
14	Sorobayan	20,315	Kas Desa	290
15	Semampir	2,890	SG	180
16	Sungapan	967	SG	118
17	Turi	8,050	Kas Desa	774
18	Celep	1,409	SG	121
19	Panasan	4,235	Kas Desa	231
20	Dlingo	40,000	Kas Desa	180
21	Ngipik	5,000	Pemda	167
22	Koripan	532	SG	53
23	Jragan	573	SG	47
24	Unggas Bantul	725	SG	166
25	Pasar Seni Gabusan		Kas Desa	79

Sumber Data: Dinas Perdagangan, 2017

Selain itu, Pasar Imogiri lolos mendapatkan sertifikat pasar ber SNI dari Badan Standarisasi Nasional. Standarisasi tersebut tertuang dalam SNI 8152:2015, dimana SNI tersebut mengatur tentang persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan yang harus dipenuhi oleh pasar rakyat.

Pembangunan kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan promosi produk melalui pameran yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. Kondisi kinerja nilai ekspor pada tahun 2017 adalah sebesar 79.200.365 US\$, mengalami kenaikan sebesar 7,09% dibanding tahun 2016.

Peningkatan ekspor didukung oleh komoditi ekspor unggulan seperti tekstil, furniture, dan handycraft, sedangkan negara tujuan ekspor utama adalah Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Perkembangan ekspor Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 1. Perkembangan Ekspor 2014-2017

Tahun 2017, sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 8,92% dalam struktur PDRB Bantul atau sebesar Rp2.034.326 Juta. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 14% atau sebesar Rp264.194 juta. Data PDRB sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2008-2017

Tahun	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2008	778,308
2009	868,617
2010	952,424
2011	1,087,696
2012	1,236,290
2013	1,347,850
2014	1,473,263
2015	1,585,613
2016	1,770,132
2017	2,034,326

a. Program yang Dilaksanakan

Program prioritas yang dilaksanakan Dinas Perdagangan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- 2) Peningkatan dan pengembangan ekspor;
- 3) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- 4) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan;
- 5) Pemberdayaan Pedagang;
- 6) Pembangunan infrastruktur pedesaan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Hasil-hasil pelaksanaan program pada urusan perdagangan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

Program ini dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi konsumen dan ketersediaan kebutuhan pokok barang strategis pada masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.154.520.000,- terealisasi Rp1.698.685.640,- (78,84). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Kemetrolagian Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal memberikan mandat kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan disusunnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPT Metrologi, dan kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, maka UPT Metrologi berada dibawah kendali Dinas Perdagangan. Tujuan dari pelayanan kemetrolagian ini adalah untuk melindungi produsen, pedagang dan konsumen dalam bidang pengukuran; menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).



Gambar 2. Pengendalian BBM

b) Pelayanan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok strategis yang meliputi komoditas pangan strategis, BBM bersubsidi, LPG, dan pupuk. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan terhadap toko, pasar dan kios untuk memantau harga setiap hari, ijin, dan jenis dagangan. Melalui kegiatan ini diharapkan distribusi dan harga barang dapat terkendali demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang konsumsi yang membahayakan kesehatan.



Dalam rangka mendukung dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok strategis di Kabupaten Bantul, melalui kegiatan ini telah dilakukan kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) sebanyak 3 kali yang difasilitasi



kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Pelaksanaan OPM barang kebutuhan pokok strategis telah dilaksanakan bulan 15 Mei 2017 di Desa Patalan, Jetis, bulan 6 Juni 2017 di Desa Terong, Dlingo dan bulan November 2017 di Desa Temuwuh, Dlingo. Sasaran dari pelaksanaan OPM adalah Keluarga Pra Sejahtera yang ada di wilayah tersebut.

Untuk mengetahui rantai distribusi komoditas cabe dan bawang merah di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan Kajian Supply Chain Barang Kebutuhan Pokok Strategis sehingga dapat diketahui penyebaran distribusi komoditas tersebut masih dikendalikan oleh pengepul sesuai dengan musimnya.

Kajian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana ketersediaan dan distribusi penyaluran pupuk sampai ke tingkat petani. Sejauh ini tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait dengan mutu pupuk dan harga eceran tertinggi di tingkat petani. Meskipun demikian

masih ditemukan di beberapa pengecer pupuk bersubsidi di repacking yang dapat menaikkan harga dan masih ada pupuk bersubsidi yang dijual di toko bukan pengecer resmi bahkan bercampur dengan makanan.

Untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok dan perlindungan konsumen dilaksanakan pengawasan terpadu bersama dengan POLRES, KODIM, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan dinas terkait lainnya yang meliputi :

1. Pengawasan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok strategis
2. Pengawasan dan pemantauan LPG 3 kg
3. Pengawasan dan pemantauan BBM (Pertamini)
4. Pengawasan dan pemantauan Bahan Berbahaya (B2)
5. Pengawasan dan pemantauan Pupuk Bersubsidi
6. Pengawasan dan pemantauan Gudang, Toko Modern dan Toko Kelontong

2) Peningkatan dan pengembangan ekspor;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor produk UKM Kabupaten Bantul dengan cara memberikan fasilitasi pameran produk dan peningkatan SDM melalui pelatihan. Dilaksanakan dengan dana sebesar 1.461.363.000,-, dan realisasi sebesar Rp 1.406.401.550,- (96,24%). Adapun kegiatan dari program ini hanya satu yakni kegiatan Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah.

Salah satu cara untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM dan meningkatkan pendapatan melalui ekspor adalah memberikan bekal pelatihan kepada UKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan pemasaran dan distribusi terhadap 30

pengusaha/perajin, pelatihan pemasaran online dengan 30 peserta yang berpotensi ekspor, serta pelatihan manajemen perdagangan luar negeri sebanyak 40 orang yang dilanjutkan dengan melakukan studi komparasi ke PT Terminal Peti Kemas di Surabaya.

Selain pelatihan, kegiatan ini juga memperkenalkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul melalui berbagai pameran yang berskala nasional. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk mempertemukan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bantul dengan para pembeli (*buyer*) yang ada di manca negara. Dari kegiatan ini diharapkan akan banyak pelaku usaha dari Kabupaten Bantul yang melakukan ekspor dan dapat meningkatkan penjualan secara berkelanjutan dengan buyer dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kegiatan ini telah terlaksana enam pameran di dalam negeri meliputi:

- (1) Pameran Furniture Jakarta;
- (2) Pameran Adiwastra Nusantara Jakarta;
- (3) Pameran TEI Jakarta;
- (4) Pameran Jakarta Fair;
- (5) Pameran Batam;
- (6) Pameran Lombok;
- (7) Pameran Medan

3) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.002.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.859.328.264,- (92,87%). Keluaran yang dihasilkan meliputi:

a) Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG)

Kegiatan pengelolaan SRG ini bertujuan untuk menstabilkan harga barang pokok pada saat harga jatuh

sehingga tidak merugikan para petani di Kabupaten Bantul.

Untuk mengoptimalkan operasional gudang SRG Kabupaten Bantul, pengelolaannya telah dikerjasamakan dengan KUD Tani Harjo Pandak sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor 35.1.1/PK/Bt/2017 dan diperpanjang dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 68/PK/Bt/2017

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pengelolaan gudang SRG meliputi Sosialisasi dan pembuatan Leaflet serta memfasilitasi SRG dalam berperan serta mengikuti promosi di Pasar lelang dan Pameran. Sosialisasi dimaksudkan untuk memfasilitasi KUD Tani Harjo sebagai pengelola dengan Gapoktan di Kabupaten Bantul agar terjalin kerjasama pemanfaatan gudang melalui sistem resi gudang.

Dalam perjanjian kerjasama yang baru pengelola SRG memberikan kontribusi ke Pemerintah Daerah sebanyak 30% dari hasil bersih, dalam hal ini KUD Tani Harjo sebagai pengelola telah mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga,

Gudang SRG dalam pengelolaannya mengoperasikan Rice Milling Unit (RMU) sehingga bisa menimbulkan dampak polusi udara, debu maupun suara di lingkungan sekitar sehingga dibuat Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Sebagai acuan untuk menjaga kualitas lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sekitar gudang SRG.

b) Peningkatan Pelayanan Perdagangan

Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan operasional PSG (Pasar Seni Gabusan).

Pada tahun 2017 terdapat 79 pedagang dengan transaksi penjualan mencapai



sebesar Rp1.400.000.000,- dengan jumlah pengunjung sebanyak 282.942 orang.

Dalam rangka mendukung dan menyemarakkan pemanfaatan Pasar Seni Gabusan (PSG), Dinas Perdagangan kabupaten Bantul telah memasukkan PSG ke dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2017 sebagai pasar tradisional kelas 1 sehingga dalam setiap event di PSG dikenakan retribusi sesuai peraturan tersebut.

Berbagai jenis kegiatan selama tahun anggaran 2017 telah dilaksanakan yang meliputi :

1. Lomba menyayi tingkat Tk dan SD se DIY;
2. Lomba Display produk kerajinan;
3. Semarak pasar seni gabusan;
4. Gebyar akhir tahun.

Dalam membantu para pengrajin, khususnya yang memanfaatkan Pasar Seni gabusan, Dinas Perdagangan telah mengadakan kerjasama dengan Bank BNI Yogyakarta dalam pemasaran produk-produk dari para pengrajin melalui sistem pemasaran secara on-line yaitu dalam Bantul Kreatif Mart.

Keberhasilan pengelolaan PSG setelah menjadi Pasar Rakyat (Agustus 2017) dapat dilihat dari perolehan retribusi pemanfaatan PSG sebesar Rp 9.191.000 (Agustus-Desember 2017)

c) Revitalisasi Pasar Tradisional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar sehingga dapat meningkatkan omset penjualan para pedagang pasar melalui rehabilitasi Pasar Janten Kasihan Bantul dengan sumber dana dari DAK.

d) Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Bergulir

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dana bergulir. Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan program pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar tradisional dengan akumulasi modal sebesar Rp6.007.300.000,00 dan telah memberikan kontribusi pendapatan jasa sebesar Rp120.146.000,- Namun demikian, program ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul yang berjumlah 11.790 orang, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk

mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

4) Pembinaan pedagang kakilima dan asongan;

Menjamurnya pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul yang memanfaatkan fasilitas umum yang bukan peruntukannya melatarbelakangi kegiatan pembuatan kawasan PKL dalam rangka penataan dan penertiban PKL.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Sosialisasi Penataan PK; Pendataan dan Penataan PKL; dan Kajian Penataan PKL. Jumlah PKL di Kabupaten Bantul yang sudah terdata sejumlah lebih kurang 2.200 orang.

5) Pemberdayaan Pedagang

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM, Kelembagaan, dan Promosi Pasar dengan anggaran Rp890.597.500 dengan realisasi sebesar Rp 875.195.000,- (98,27). Kegiatan ini dilaksanakan antara lain untuk enguatan kelembagaan melalui fasilitasi kepada Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul dan dimaksudkan agar organisasi ini menjadi lebih kuat dan mandiri, sehingga bisa menjadi pengayom dan perekat ikatan kekeluargaan sesama pedagang pasar, diwujudkan dalam bentuk fasilitasi, rapat koordinasi dan pendampingan organisasi demi keselarasan APPSI dan Dinas Perdagangan.

Peningkatan kemampuan pedagang pasar dalam mengelola usaha dan mengelola keuangan atas usaha yang dijalankannya dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan pedagang pasar ini dilaksanakan bekerjasama dengan pakar kewirausahaan dari perguruan tinggi (UGM), terdiri dari 18 kali pelatihan dengan peserta masing-masing 40 orang.

6) Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan infrastruktur pedesaan.

Program ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp8.496.275.000,- terealisasi Rp8.157.855.292,- (96,02%) dalam rangka peningkatan kualitas pasar tradisional/rakyat sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah. Keluaran yang dihasilkan adalah pembangunan Pasar Semampir, Pasar Hewan Pleret dan Pasar Panas. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat/tradisional di Kabupaten Bantul. Program peningkatan kualitas infrastruktur pasar tradisional yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar dan pendampingan penataan pasar tradisional sebagai bagian dari percepatan peningkatan perekonomian daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh pasar tradisional adalah tumbuhnya mini market/toko modern, bertambahnya jumlah pedagang dari waktu ke waktu, dan masih banyaknya para pemilik modal swasta (rentenir) yang beroperasi di pasar.



Pasar yang direhab pada TA 2017

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan perdagangan (lihat Tabel 3).

Tabel 3
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Perdagangan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga perlu dilakukan pemantauan secara kontinyu dan ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerjasama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar
2	pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	Pemantauan kualitas barang beredar dilakukan melalui pengujian mutu secara berkelanjutan dan diperlukan penegakan hukum secara terpadu
3	Distribusi barang komoditas bahan pokok masih cukup panjang untuk bisa sampai pada tingkat pedagang pasar, sehingga berdampak terhadap harga produk yang mahal ditingkat konsumen.	Memutus jalur distribusi barang agar lebih cepat dan efisien
4	Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Pemanfaatan teknologi informasi, promosi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi UMKM agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri
5	Daya saing produk yang semakin tinggi dengan berlakunya MEA	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan promosi yang lebih intensif.- Peningkatan daya saing.
6	Mindset / pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	<ul style="list-style-type: none">- Pelatihan Manajemen Pasar- Meningkatkan kapasitas pelayanan kebersihan dengan menambah armada truck sampah.
7	Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Memperluas jangkauan/distribusi pengelolaan dana bergulir serta menambah modal, agar semakin maksimal pedagang yang terlayani.

Sumber: Dinas Perdagangan, 2017

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP
LPPD TAHUN 2017**

**LAMPIRAN: III.1 FORMAT IKK UNTUK
KABUPATEN**

KABUPATEN: -----

	ASP EK	FOK US	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah ¹ seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2017, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2017, sebanyak ----- Unit. %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudu kan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP Hr	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp. / Tidak dipung ut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.

		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2017, berjumlah = ----- orang 	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD
--	--	--	---	---	--	---	-------------------------	----------------------

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2017,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal --- ---- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor ---- tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yg telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2017 disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Pendidikan 2) Urusan Kesehatan 3) Urusan PU dan Penataan Ruang 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 6 urusan.	

						Permukiman 5) Urusan Trantibum dan Linmas 6) Urusan Sosial		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----, 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----, 3) Dst--- MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> ²	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 9 rogram/agenda prioritas. %	Sumber data dari BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
Kewenangan		15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2017 (APBD) = ----- urusan. %	Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2017.	
Keuangan		16	Waktu penetapan PERDA APBD 2017	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2016	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2017. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2016).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD	
		17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD	
		Belanja untuk pelayanan dasar	18	Belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan PU dan Penataan Ruang %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil	

						Rp.----- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan-		merupakan realisasi belanja per-
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

² Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
					Permukiman Rp..... 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. ----- 6) Urusan Sosial Rp..... Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----- Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. -----		evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2016. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp.</u> ----- Total Belanja Pend & Kes Rp. ----- %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> ³ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2017 sebanyak -- ----- orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2017 sebanyak ----- orang.	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

³ Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	2 3	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Jumlah Perangkat Daerah, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) <u>Kecamatan/Distrik</u> = ---- unit unit Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	2 4	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2017	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	2 5	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2017	- RAPERDA yang disetujui tahun 2017, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang diusulkan DPRD tahun 2017 sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	2 6	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Bupati	2 7	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2017 x 100%	- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2017, sebanyak -- ---- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2017 , sebanyak -- ---- keputusan. %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	2 8	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati dalam tahun 2017, sebanyak ----- %	Sumber data dari Bagian Hukum

				dalam tahun 2017 x 100%	Perbup.		
--	--	--	--	----------------------------	---------	--	--

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
	ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Mediana :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. ----- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. - %	Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
Alokasi Belanja pada APBD	34	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp----- - Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: -----	Opini tahun 2016 = ----- Opini tahun 2017= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i>); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i>); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i>), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i>). Opini LHP Tahun 2016, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
					Jumlah temuan BPK	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan		Sumber data dari Inspektorat. Data

		Pengawas an Inspektor at Kabupate n	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017	Tahun 2017, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----- temuan. %	merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2017 terhadap potensi PAD ⁴	Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2017 APBD %	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

⁴ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASP EK	FOKUS	No.	IK K	RUMUS/ PERHITUN GAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian KInerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	4 1	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2017 - PAD 2016) : PAD 2016 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp. ---- %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	4 2	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Penghargaan yang diterima, sebanyak 4 yang terdiri dari 1. Sertifikasi Pasar Rakyat ber SNI 8152:2015 untuk Pasar Imogiri dari Kementerian Perdagangan 2. Juara III Stand Terbaik Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif di Mataram NTB 3. Juara III Stand Terbaik Pameran Tourism Trade Investment (TTI Ekpo) di Banjarmasin 4. Juara III Stand Terbaik Pameran Jatim Trade Expo di Surabaya	4 Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	4 3	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	4 4	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2017	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP (nilai masing-masing ijin investasi >= 200 juta)- (PMDN)

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK)
ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA
EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : BANTUL
NAMA PERANGKAT
DAERAH : DINAS
PERDAGANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERDAGANGAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan
1 (satu) urusan

	ASP EK	FOK US	NO	IKK	Rum us	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh PerangkatDaerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PerangkatDaerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. yaitu: 1) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen 3) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 5) Program Pengembangan Ekspor Nasional 6) Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi Jumlah program nasional yang dilaksanakan PerangkatDaerah, sebanyak 3 program yaitu:	50 %	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir.

					<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dalam DPA dengan nama program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, dalam DPA dengan nama program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 3) Program Pengembangan Ekspor Nasional, dengan nama Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor 			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	<p>Ada, ada banyak 53 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat dengan 40 SOP 2. Bidang Pengembangan Perdagangan dengan 4 SOP 3. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan dengan 2 SOP 4. Bidang Pengembangan Pasar dengan 5 SOP 5. UPT Metrologi dengan 2 SOP 	Ada 53 SOP	SOP yg dimaksud` adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 6 - PERDA yang seharusnya, 	100 %	Normalisasi

		menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<p>sebanyak 6</p> <p>Terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Nomor 12/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 2. Perda Nomor 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar 3. Perda Nomor 2/2016 tentang Retribusi Jasa Umum 4. Perda Nomor 13/2014 tentang Perijinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 5. Perda Nomor 7/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 6. Perda Nomor 7/2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir 		
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak 16 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 16 	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----. TIDAK ADA	tidak ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Dinas Perdagangan, sebanyak 121 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	93,75 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt.	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2017.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2017-2021 2. Renja 2017 3. DPA 2017 4. PK 2017	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
			10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir	program - Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA		Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA-

	ASP EK	FOK US	N O	IK K	Rum us	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perangkat Daerah		dalam RKA Perangkat Daerah	dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100 %	dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 24.814.281.880,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp---- %	Sumber data dari APBD tahun 2017 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 8.585.588.050,- - Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.19.625.360.516,-	43,75 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 383.795.401,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 7.455.044.467,-	5,15 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 383.795.401,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.625.360.516,-	1,96 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2017 terakhir.

		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, CaLK)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
--	--	-----------------------------------	----	--	--	---	--	---

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, Sebutkan jenis dokumennya: 1. Kartu Inventaris A 2. Kartu Inventaris B 3. Kartu Inventaris C 4. Kartu Inventaris D 5. Kartu Inventaris E 6. Kartu Inventaris F 7. Buku Inventaris	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 . - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp170.265.891.679,-	0%	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Media cetak 2. Media Elektronik 3. Media online 4. Mobil Keliling 5. Papan Pengumuman 6. Kotak Saran 7. Email 8. Leaflet	Jumlah sebanyak 8 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap	Ada, survey kepuasan tentang Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perdagangan (IKM)	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

				Pelayanan publik			
--	--	--	--	------------------	--	--	--

**TATARAN PELAKSANA
KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB
DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP
LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN:---

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 tahun}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil

		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

			<p>100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama</p>		
		16	<p>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</p> <p>----- x</p> <p>100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		17	<p>Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin</p> <p>----- x</p> <p>100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		18	<p>Cakupan kunjungan bayi</p> <p>----- x</p> <p>100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama</p>%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$ %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		20	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$ <p style="text-align: center;">25 pasar ----- x 100% = 75,76% 33 pasar</p>	75,76%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		22	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$ %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$ %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
				Jumlah rumah tangga ber sanitasi		Pembilang (satuan KK yaitu jumlah

		25	Rumah Tangga Per-sanitasi	----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga%	KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
--	--	-----------	---------------------------	--	--------	--

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		26	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		30	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		32	Lapangan olahraga .	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ <p>Lapangan olah raga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lap sepakbola, = ----- lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap 5. kolam renang., = ----- lap <p>$\frac{\text{lap Jumlah}}{\text{lap}}$ = -----</p>	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2017} - \text{Realisasi PMDN 2016}}{\text{Realisasi PMDN 2016}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$%	Sumber data Dinas Koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil

9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100 \%$%	Sumber data Dinas Duk Cakil
---	--	-----------	-----------------	---	--------	-----------------------------

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		42	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\% \text{ Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan

	Anak	44	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\% \text{ Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan
--	-------------	-----------	---	---	--------	---

N O	URUSAN	NO.	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$%	Sumber data dari BKKBN
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan}}{\% \text{ PLKB/PKB}} \times 100$%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	Sumber data dari dinas perhubungan
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahunkali	Sumber(Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$%	Sumber : Dinas Pertanahan (rekap surat permasalahan)
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Pertanahan

N O	URUSAN	NO	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\% \text{ Jumlah PKK}} \times 100$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		55	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\% \text{ Total Posyandu}} \times 100$%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerahbuah	Sumber data dari Dinas Sosial
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun}}{\text{Total}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Sosial
19	Kebudayaan	59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Statistik	62	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		63	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$%	Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		67	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}}$	Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah Sumber data penyebut dari Dukcapil
URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Sumber data dari Dinas Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100% Jumlah total PDRB%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahunorang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku

N O	URUSAN	NO	IK K	RUMUS/ PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)
		8	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2017} - \text{Jumlah Industri tahun 2016}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2017}} \times 100\%$%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$ <p>Rp2.034.326.000.000,- -----x 100% = 8,92% Rp22.816.226.000.000,-</p>	8,92 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	<p>Nilai ekspor bersih = nilai ekspor - nilai impor = 79.200.365,6 - 821.991,81 = 78.378.373,79</p>	78.378.373,79 US\$	Sumber data dari Dinas Perdagangan
6	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$%	Sumber data Dinas Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA

		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA



		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybsbuah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerahKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKPKeg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

LAMPIRAN A

Prestasi dan Penghargaan

1. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan

Prestasi/penghargaan dalam urusan perdagangan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebanyak 4 prestasi/penghargaan. Penjabaran prestasi tersebut disajikan dalam table A.14.

Tabel A.14
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan
Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
1	Pasar ber -SNI	Nasional	Lisensi SNI 8152:2015 tentangSertifikasi SNI Pasar Rakyat untuk Pasar Imogiri, dengan no lisensi: LSTK.03417DN/LSPPro-PPMB/11/2017 tanggal 27 November 2017
2	Stand Pameran	Nasional	Juara III Stand Terbaik Pameran Agribisnis dan Pangan Inovatif di Mataram NTB
3	Stand Pameran	Nasional	Juara III Stand Terbaik Pameran Tourism Trade Investment (TTI Ekpo) di Banjarmasin
4	Stand Pameran	Nasional	Juara III Stand Terbaik Pameran Jatim Trade Expo di Surabaya

Sumber: Dinas Perdagangan, 2017